

KONGRES V: PENDIDIKAN,
PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN

**PANCASILA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL:
Grand Design, ATHG, dan Konsepsi Implementasi**

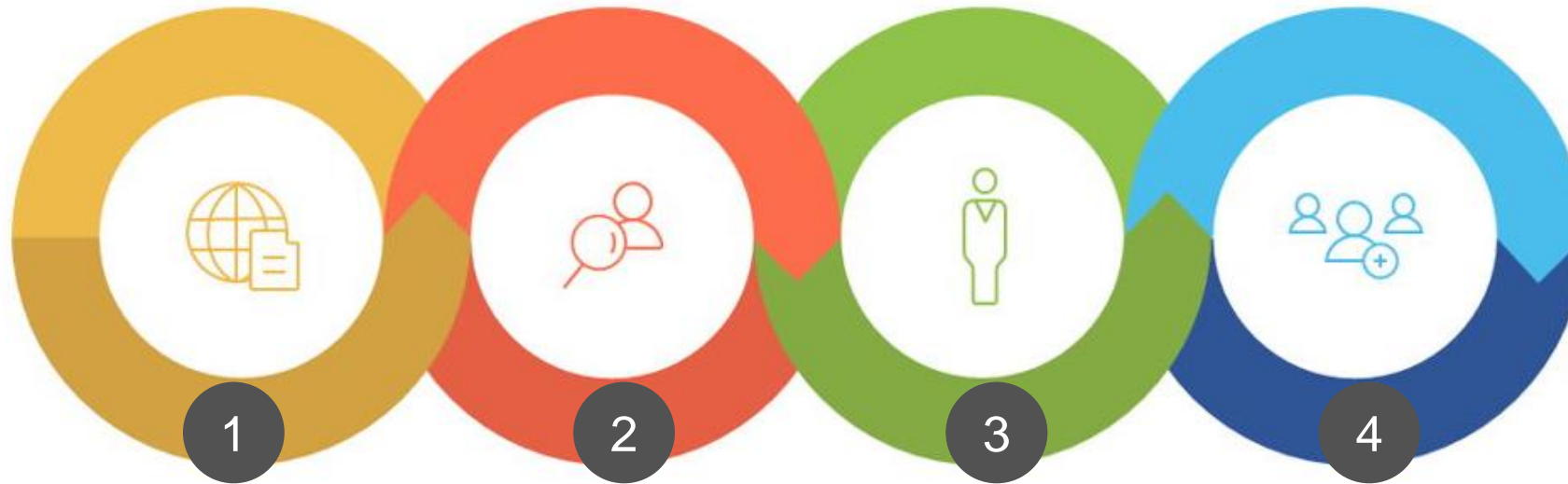


Panelis:

Prof. Dr. Unifah Rosjidi, M.Pd.

Ketua Umum PB PGRI

PENDAHULUAN



Perwujudan Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD-1945) adalah Negara kebangsaan, Negara demokratis, Negara kesejahteraan, Negara yang menjunjung tinggi HAM, serta Negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

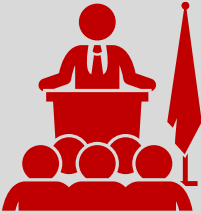
Pada saat proklamasi kemerdekaan, wujud Negara Pancasila tersebut barulah merupakan cita-cita, karena itu setiap penyelenggara pemerintahan/negara perlu berusaha mengemban misi mewujudkan bangsa yang cerdas.

Maknanya adalah melakukan transformasi budaya tradisional menuju budaya modern, budaya feodal menuju budaya demokratis, serta budaya birokratis menuju budaya yang profesional.

Makna kecerdasan itu adalah masyarakat dan bangsa dengan kehidupan yang semakin maju dan moderen.

Sejumlah Negara yang kini menjadi Negara maju, terutama yang memiliki filosofi kenegaraan yang tertuang dalam konstitusinya dan yang mantap kehidupan politiknya adalah Negara yang sejak kemerdekaannya telah menempatkan pendidikan sebagai fondasi pembangunan Negara.

Kerangka Pikir Revolusi Mental



Visi Presiden

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”



Arahan Presiden

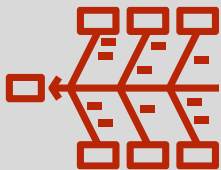
Pembangunan SDM



Pembangunan SDM

Strategi :
Pembangunan Karakter

Substrategi :
Revolusi Mental & PIP



7 Agenda Prioritas

Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional 4):
Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan



PN4-PP1

Revolusi Mental & Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang modern dan berkarakter



Revolusi Mental

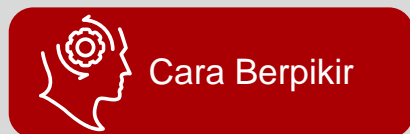
GERAKAN UNTUK MENGUBAH cara pikir, cara kerja dan cara hidup bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

Pembinaan Ideologi Pancasila

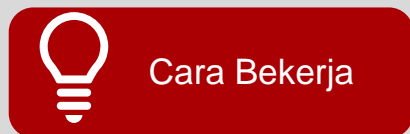
Menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme melalui pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara



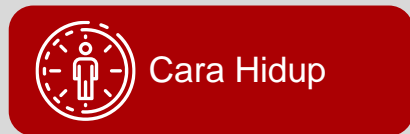
Melakukan Perubahan



Cara Berpikir



Cara Bekerja



Cara Hidup

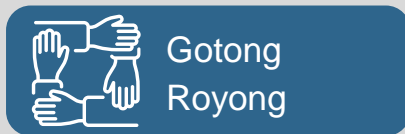
Membangun Karakter



Integritas



Etos Kerja



Gotong Royong

Tujuan Nasional



Mewujudkan
Tujuan Bernegara



Indonesia:
Berdaulat;
Berdikari;
Berkepribadian

GERAKAN *Revolusi*
NASIONAL *Mental*

Menko PMK, 2021

KP.6

Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewargaan, Wawasan Kebangsaan, dan Bela negara

ProP 1: Pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara

ProP 2: Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

ProP 3: Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

ProP 4: Membersihkan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara

KP.5

Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila

ProP 1: Membangun budaya ekonomi nasional dengan *platform* koperasi dalam kegiatan usaha produktif

ProP 2: Peningkatan etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong

ProP 3: Penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri

ProP 1: Pemantapan pelaksanaan lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu

ProP 2: Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan Revolusi Mental di daerah

KP.1 Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan



ProP 1: Pengembangan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan (*bullying free school environment*)

ProP 2: Penguatan pendidikan agama, nilai toleransi beragama, dan budi pekerti dalam sistem pendidikan

ProP 3: Peningkatan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, serta pengembangan pendidikan kepramukaan

KP.2

Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan

ProP 1: Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya

ProP 2: Penerapan disiplin, *reward* dan *punishment* dalam birokrasi

KP.3

Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat

ProP 1: Penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup.

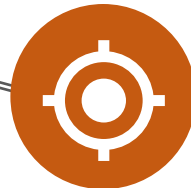
ProP 2: Peningkatan ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan antargenerasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga

ProP 3: Pewujudan lingkungan yang kondusif melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi dunia usaha.

KP.4

Penguatan Pusat-pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental

REVOLUSI MENTAL & PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA





KP.6

**Pembinaan Ideologi Pancasila,
Pendidikan Kewargaan,
Wawasan Kebangsaan, dan
Bela Negara**

ProP 1:

Pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara

ProP 2:

Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

ProP 3:

Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

ProP 4:

Membersihkan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara

Pancasila dalam Pendidikan di Indonesia 1946-1965

- Sejak tahun 1946 Kementrian PP dan K sudah membuat Pedoman bagi Guru yang memuat sifat kemanusiaan dan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila. Pedoman ini digunakan agar guru-guru di Indonesia mampu menghasilkan manusia yang memiliki jiwa patriotisme pasca Indonesia merdeka.
- UU 4/1950 tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah, merupakan UU Pendidikan pertama yang memuat Pancasila, UUD 1945, dan asas kebudayaan Indonesia sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah.
- UU 22/1961 tentang Perguruan Tinggi bertujuan Membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat sosialis. Disini bisa dilihat sebuah konstelasi dimana Pancasila mulai disusupi oleh kepentingan kaum komunis (konteks politik pada masa itu dimana PKI berhasil meraih suara terbanyak keempat di parlemen, setelah PNI, Masyumi, dan NU pada pemilu 1955)
- Periode 1959-1965 Keppres 145/1965 yang bertujuan agar pendidikan melahirkan warga negara sosialis dan berjiwa Pancasila. Ini sejalan dengan situasi politik pada masa itu yang cenderung dekat dengan kelompok Komunis
- Dalam Kurikulum sejak tahun 1950 muncul mata pelajaran Sejarah Indonesia, Sejarah Dunia, dan Sejarah Kebudayaan sebagai muatan wajib untuk menanamkan patriotism.
- Tahun 1959-1961 muncul mata pelajaran Civic yang muatan materi pembelajarannya merujuk pada MANIPOL-USDEK
- Pelajaran penting : Pancasila harus tetap terjaga kemurniannya dari berbagai macam ancaman ideologi yang datang baik dari dalam maupun luar.

Pancasila dalam Pendidikan Masa Orde Baru

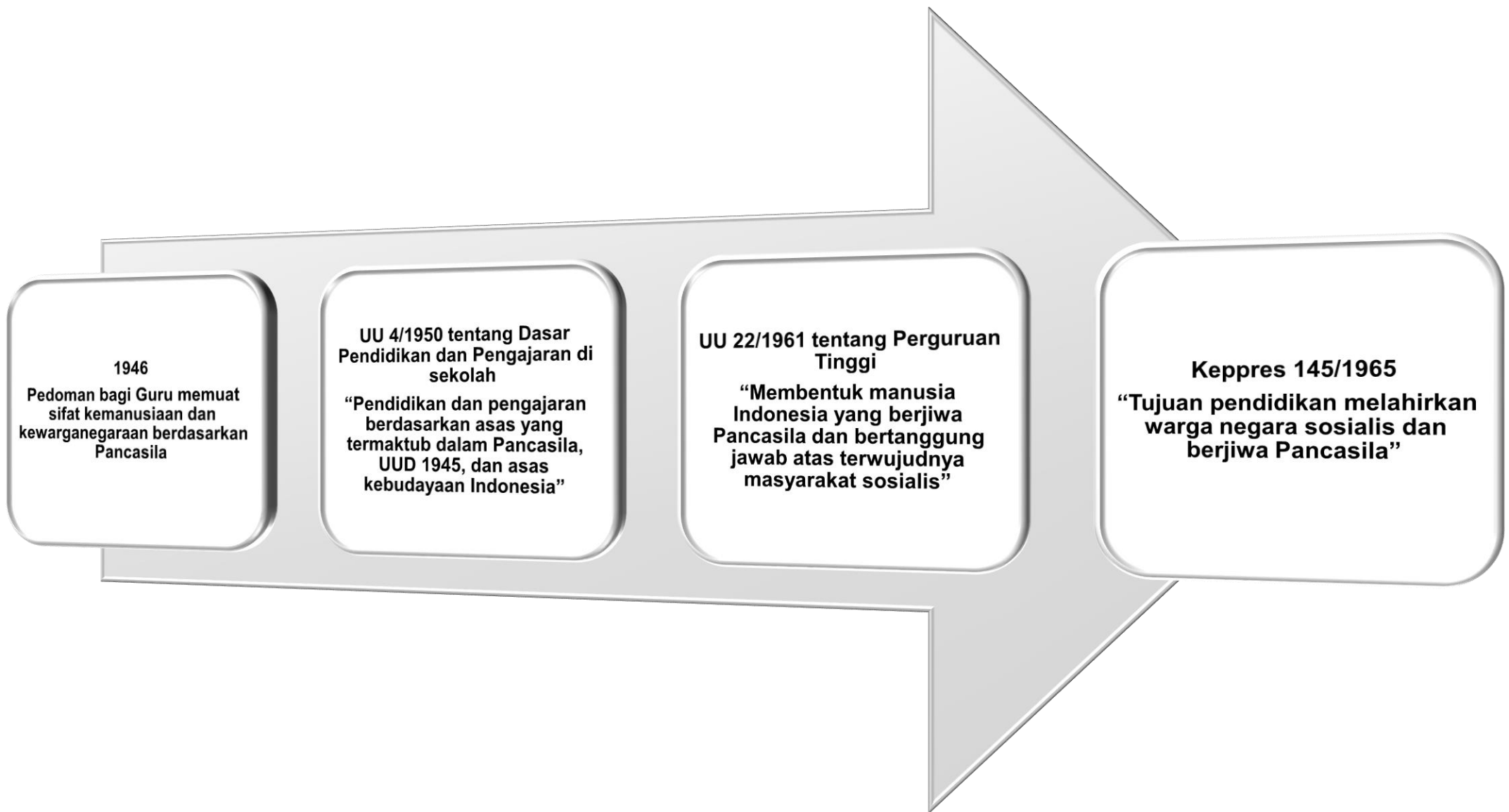
- Pemerintah Orde Baru menerbitkan TAP MPRS XXVII/1966 yang bertujuan Membentuk Manusia Pancasila Sejati, serta mencabut Keppres 145/1965.
- Pendidikan nasional diarahkan membentuk masyarakat Pancasila dengan cara mengendalikan memori kolektif bangsa akan semangat perjuangan masa lalu dan penguatan ideologi Pancasila.
- Pengejawantahannya dalam Kurikulum 1975 adalah Menyusun buku Sejarah Nasional Indonesia dibawah pimpinan Mendikbud-Sejarawan Prof. Nugroho Notosusanto, menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran dalam bentuk Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Kemudian pada Kurikulum 1984 ada mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB).
- Tahun 1989 Pemerintah Orde Baru berhasil Menyusun UU 2/1989 tentang Sisdiknas yang menegaskan bahwa Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- **Pelajaran penting: Pemerintah Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai alat indoktrinasi melalui tafsir tunggal dan intervensi kurikulum, semua ini pada akhirnya gagal karena cenderung digunakan sebagai alat legitimasi untuk melanggengkan kekuasaan Presiden.**

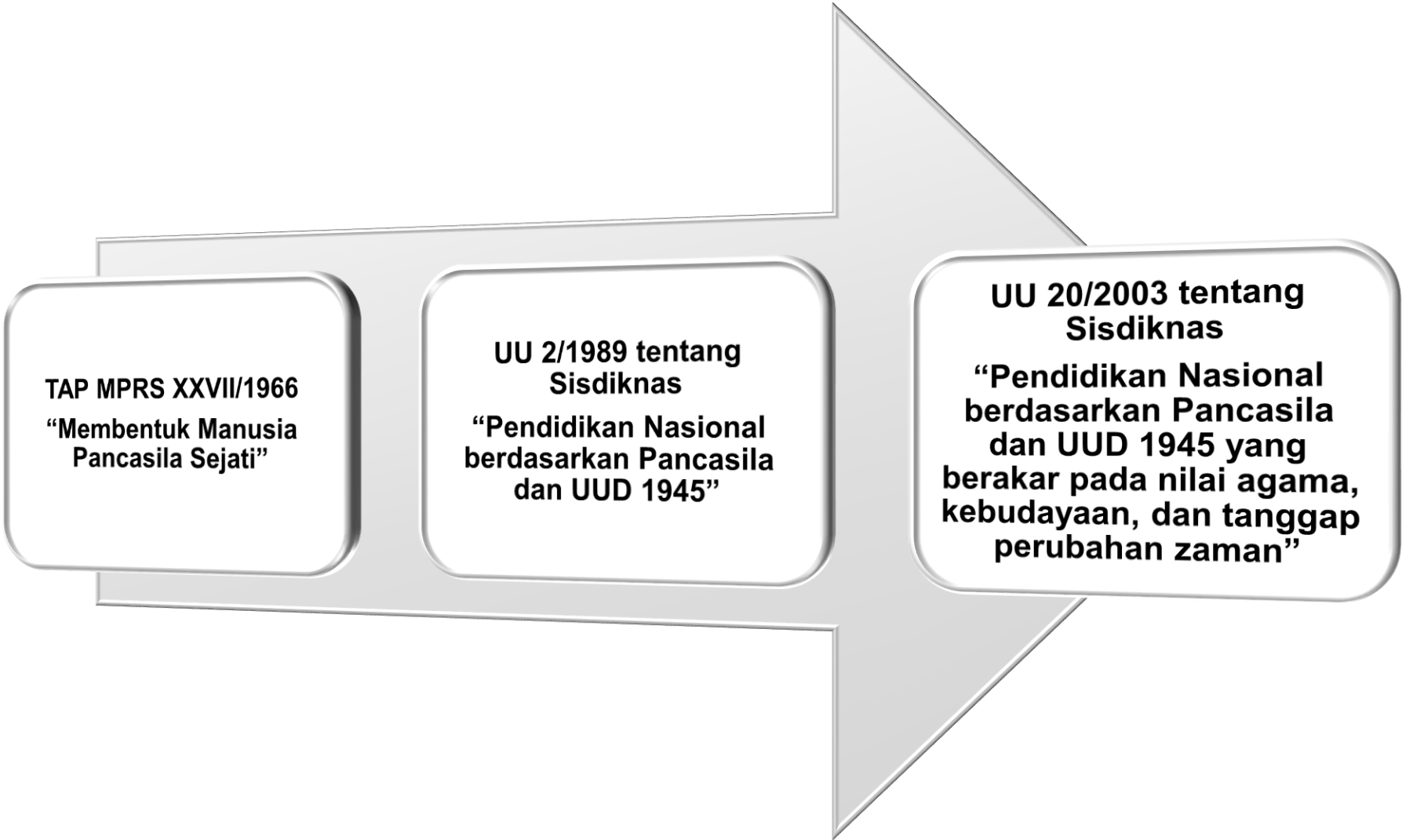
Pancasila dalam Pendidikan Era Reformasi

- Dimasa pemerintahan Presiden Megawati terjadi revisi dari UU 2/1989 ke UU 20/2003 tentang Sisdiknas yang kembali menegaskan Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan, dan tanggap perubahan zaman.
- Frase Pancasila tidak termuat sebagai muatan wajib di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di UU 20/2003, melainkan kewarganegaraan, dalam kurikulum menjadi PKN
- Presiden SBY tahun 2010 mencanangkan Gerakan Pembangunan Karakter Bangsa yang dikejawantahkan dalam 18 nilai pendidikan karakter.

Pancasila dalam Pendidikan Pasca Reformasi

- Presiden Jokowi tahun 2017 menerbitkan Perpres 87/2017 tentang Penguatan Karakter Bangsa yang bertujuan membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter untuk menghadapi masa depan
- Mendikbud Nadiem Makarim tahun 2020 menjadikan Profil Pelajar Pancasila sebagai muara dari Peta Jalan Pendidikan 2020-2035.
- Pancasila diintegrasikan dalam Muatan wajib Kewarganegaraan yang pengejawantahannya di Pendidikan Dasar dan Menengah melalui mata pelajaran PPKn sebagaimana amanat UU 20/2003 Pasal 37 Ayat 1.
- Sedangkan di Perguruan Tinggi Muatan Pancasila dijadikan muatan wajib dikejawantahkan dalam mata kuliah Pancasila, sebagaimana amanat UU 12/2012 tentang Perguruan Tinggi.
- Polemik revisi PP 57/2021 menyisakan celah hukum bahwa frase Pancasila tidak termuat sebagai muatan wajib di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di UU 20/2003, melainkan kewarganegaraan. Karena itu memasukkan Pancasila sebagai muatan wajib di revisi PP 57/2021 akan bertentangan dengan UU 20/2003. Jika ingin menjadikan Pancasila sebagai muatan wajib yang dikejawantahkan melalui mata pelajaran Pancasila yang bersifat *lex specialis*, maka harus ada revisi terhadap UU 20/2003.
- Perlu ada komunikasi dan kolaborasi antara BPIP sebagai pihak yang berwenang menangani konten ideologi Pancasila dengan Puskurbuk sebagai pihak yang berwenang mendesain Kurikulum, jangan sampai overlap!





TAP MPRS XXVII/1966
**“Membentuk Manusia
Pancasila Sejati”**

**UU 2/1989 tentang
Sisdiknas**
**“Pendidikan Nasional
berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945”**

**UU 20/2003 tentang
Sisdiknas**
**“Pendidikan Nasional
berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 yang
berakar pada nilai agama,
kebudayaan, dan tanggap
perubahan zaman”**

**Gerakan Nasional
Pembangunan Karakter
Bangsa
5 Karakter dan 18 Nilai**

**Perpres 87/2017 tentang
Penguatan Karakter
Bangsa**

**“Bertujuan membangun
dan membekali peserta
didik sebagai generasi
emas 2045 dengan jiwa
Pancasila dan
pendidikan karakter
untuk menghadapi
masa depan**

**PROFIL PELAJAR
PANCASILA**



Sumber Pidato 1 Juni 1945



Sumber-sumber primer memahami Pancasila

152110 152110
Mohammad Hatta
Ahmad Subardjo Djoadisurjo
A.A. Maramis
Sunario
A.G. Pringgogido



URAIAN
PANCASILA



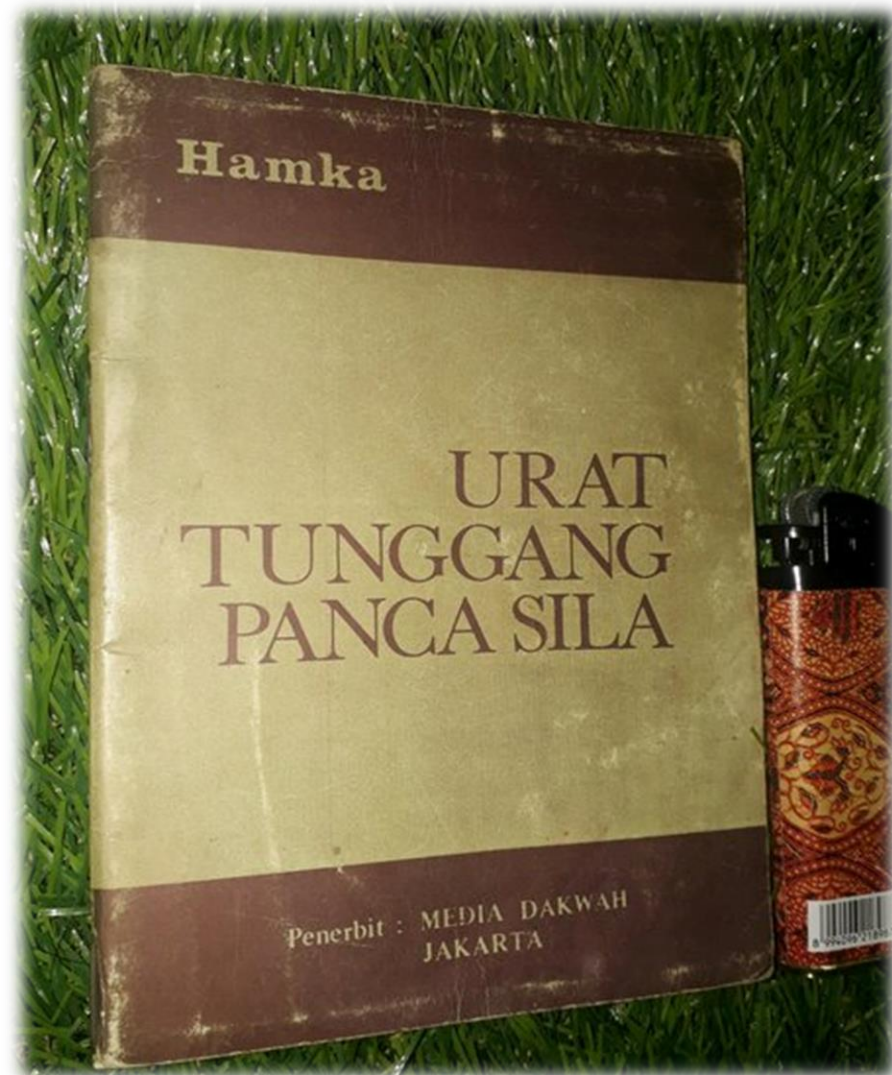
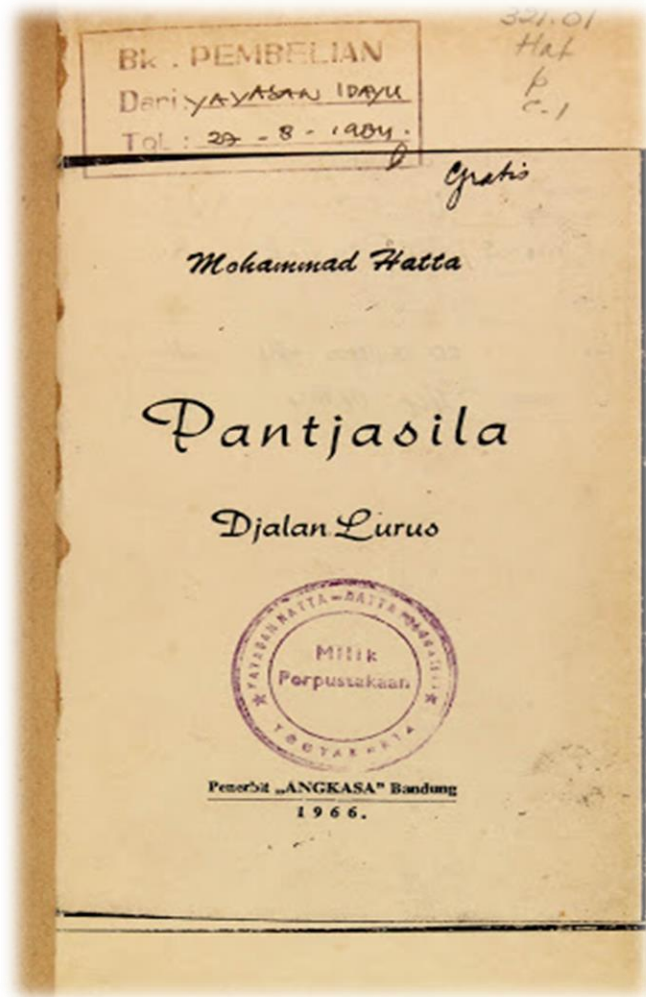
**RISALAH SIDANG
BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA
PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA
(BPUPKI)**

**PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN
INDONESIA
(PPKI)**

28 MEI 1945 – 22 AGUSTUS 1945

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, 1998

CONTOH REFERENSI UTAMA



PPKn dalam Pendidikan di Indonesia dari masa ke masa (Ditjen Belmawa Kemristekdikti, 2016)

- Kewarganegaraan (tahun 1957)
- Civic (tahun 1962)
- Pendidikan Kewarganegaraan (Kurikulum 1968)
- Pendidikan Moral Pancasila-PMP (Kurikulum 1975)
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-PPKn (Kurikulum 1994)
- Pendidikan Kewarganegaraan-PKn (Kurikulum 2006)
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-PPKn (2013)

Istilah PPKn di Berbagai Negara

- Pendidikan Kewarganegaraan (Indonesia)
- Civic Education (Amerika Serikat)
- Citizenship (Inggris)
- Ta'limatul Muwwatanah, Tarbiyatul Watoniyah (Arab, Timur Tengah)
- Educacion Civic (Meksiko)
- Civic and Moral (Singapura)
- Civic Social Studies (Australia)
- Pendidikan Sivik (Malaysia)
- Sachunterricht (Jerman)
- Social Studies (Selandia Baru)
- Dan lain-lain

Menjernihkan Pancasila melalui literasi atas Sumber-Sumber primer dan kredibel

- Menjadikan Pidato 1 Juni 1945 oleh Bung Karno sebagai bacaan wajib anak sekolah
- Menjadikan buku Uraian Pancasila yang disusun oleh Mohammad Hatta, Maramis, Ahmad Subarjo, Prof. Sunario, dan A.G. Pringgodigdo sebagai bacaan wajib
- Menjadikan buku risalah Sidang BPUPK-PPKI sebagai bacaan wajib
- Serta Buku-buku kajian Pancasila yang teruji baik secara akademis maupun aktualitas secara kontekstual dalam kehidupan
- **Memperkuat mata pelajaran yang bersifat ideologis dengan menjadikannya sebagai muatan wajib pada struktur kurikulum dengan jumlah jam proporsional, antara lain Sejarah, Pancasila, Bahasa Indonesia, Agama**

PENGATAR

1. Selama ini pembelajaran Pancasila terlalu teoritis dan kaku, berorientasi terhadap guru, sehingga belum terbukti berhasil.
2. Sampai saat ini sudah terjadi 7 kali perubahan nama PPKN dari mulai civics tahun 1968, PMP tahun 1975, PPKN, PKN, akan tetapi perubahan yang dilakukan belum terbukti bisa merubah efektifitas Pendidikan Pancasila.
3. Oleh karena itu, diperlukan transformasi Pendidikan Pancasila di semua jenis, jenjang, dan jalur Pendidikan dalam kaitan dengan:
 - a. Konten pembelajarannya yg bersumber dari ideologi Pancasila
 - b. Pendekatan pembelajaran yang terpusat kepada guru harus ditransformasi menjadi pembelajaran berbasis project yang mengaktifkan para siswa untuk belajar.
 - c. Pendekatan pembelajaran tidak berorientasi terhadap penguasaan teori, tetapi berorientasi terhadap proses belajar, agar tumbuh nurturing effect dalam penanaman nilai Pancasila.
 - d. Assemsment pendididkan Pancasila harus ditransformasi dari ujian teori menjadi uji perilaku yang menentukan terhadap kelulusan sekolah atau kenaikan kelas.



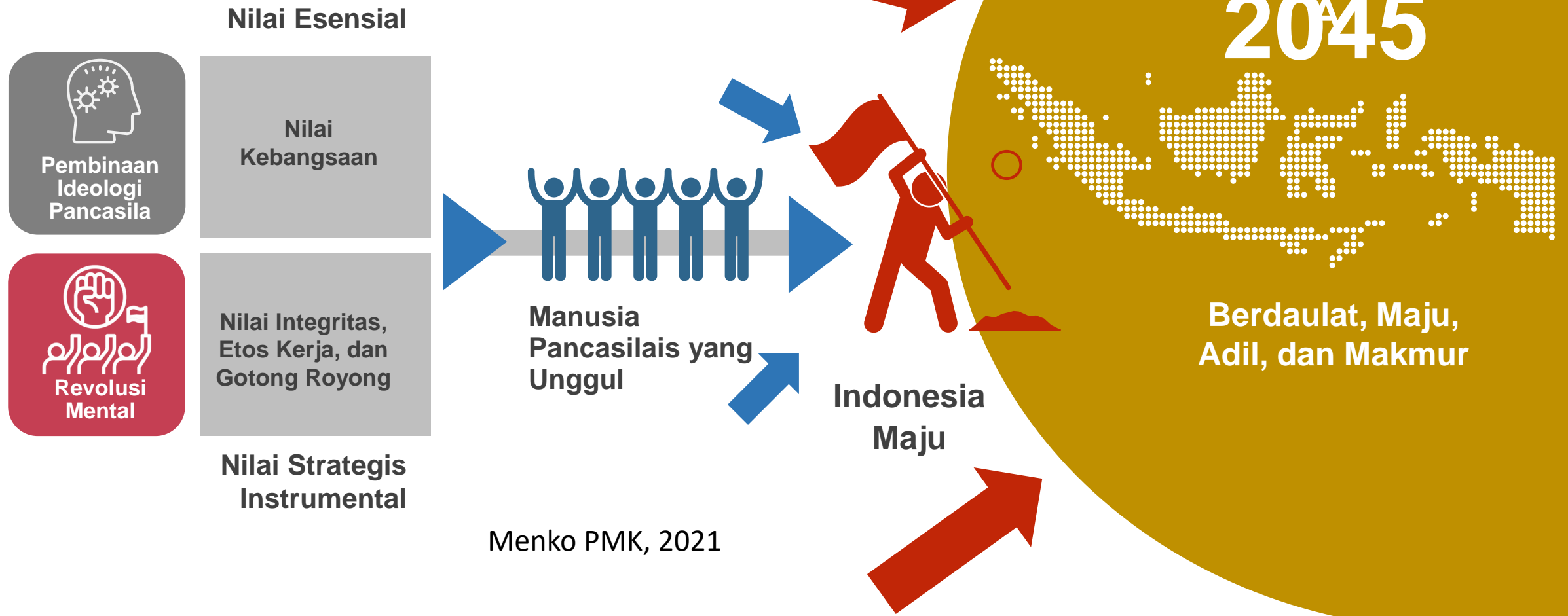
GRAND DESIGN

Keberhasilan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional sangat ditentukan oleh titik keseimbangan yang optimal antara dua pilihan kepentingan yang tarik-menarik:

1. Berorientasi pada fungsi pembudayaan dalam rangka memperkuat nilai-nilai kebangsaan agar dapat memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Penguatan keunggulan dan daya saing bangsa dalam persaingan global.

Indonesia tidak perlu memilih salah satu dari keduanya, tetapi mencari titik keseimbangan yang dinamis dengan maksud untuk memperoleh keunggulan dalam persaingan global tetapi tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang berdaulat dan mampu mewujudkan empat misi penyelenggaraan pemerintahan Negara RI (termaktud dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945)

Kontribusi Revolusi Mental bagi Indonesia Maju




Menko PMK, 2021

No	Ancaman
1	Banyak ideologi alternatif yang mulai berkembang di masyarakat
2	Pengaruh asing dalam era globalisasi,
3	Proxy War
4	Buta aksara fungsional (Functionally Illiterate)

No	TANTANGAN
1	Indonesia akan menjadi negara demokratis dengan keterbukaan yang tinggi
2	Perubahan UU No 20 / 2003 Sisdiknas
3	Perubahan Kurikulum, Pembelajaran, dan assesment
4	Peningkatan kemampuan guru dan tenaga kependidikan dan LPTK
5	Pengelolaan Pendidikan yang semakin terbuka dan transparan
6	Perimbangan antara Sentralisasi dan Desentralisasi
7	Pluralisme

No	HAMBATAN
1	Sistem Pengelolaan Pendidikan yang terlalu birokratis sehingga tidak mudah membuka peluang bagi transformasi pendidikan
2	Proses pembelajaran konvensional yang masih dominan (kurikulum, proses pembelajaran, dan assesment)
3	Materi pembelajaran belum tersedia, masih menggunakan pendekatan teoritis
4	Landasan hukum tidak tersedia

No	GANGGUAN
1	Sikap-sikap anti perubahan (resistance to change)
2	Organisasi kurikulum yang kaku
3	Kepentingan rezim
4	Pengaruh asing dan geopolitik
5	Komunikasi tidak sehat (buzzer)



**TANTANGAN
BAGI SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL
YANG BERDASARKAN
PANCASILA**

1

**REVOLUSI INDUSTRI
4.0 & ARUS DERAS
GLOBALISASI**

2

**KEMAMPUAN DAYA
SAING INDONESIA**

1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0 & ARUS DERAS GLOBALISASI:

Tantangan terberat yang kita hadapi saat ini adalah dampak dari Revolusi Industri 4.0 yang secara fundamental mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain.

Mengapa kita risaukan ?

Pengaruh ini berkelindan dengan munculnya *deprivasi sosial* sebagai dampak dari arus globalisasi yang demikian deras. Gejala yang paling tampak misalnya **lemahnya modal sosial**, akibat: (1) semakin sempitnya ruang-ruang pertemuan; (2) terbatasnya jaring-jaring konektivitas (konektivitas fisik boleh hebat, namun konektivitas hati dan pikiran sering kali terhambat); (3) memudarnya semangat inklusifitas. Akibatnya diantara sesama komponen bangsa mulai tidak saling percaya (tidak memiliki trust satu sama lain). Kondisi demikian itu mengakibatkan tidak adanya keakraban hidup berwarganegara.



2. KEMAMPUAN DAYA SAING INDONESIA MASIH LEMAH:

Dalam berbagai indikator persaingan global posisi Indonesia masih belum menggembirakan.

Perhatikan tiga data berikut!

- (1) Indeks pembangunan manusia (*human development index*) pada 2020 masih berada pada ranking 107 dari 189 negara.
- (2) Tingkat keinovasian dan usaha memajukan perekonomian berbasis pengetahuan (*the knowledge economic index, the knowledge index* dan *innovation index*) masih harus terus dipacu.
- (3) Tingkat kemampuan literasi, numerasi dan pemecahan masalah berdasarkan PISA masih rendah (2018), bahkan menurun dari capaian 2015.



Pengantar

1. Selama ini pembelajaran Pancasila terlalu teoritis dan kaku, berorientasi terhadap guru, sehingga belum terbukti berhasil.
2. Sampai saat ini sudah terjadi 7 kali perubahan nama PPKN dari mulai civics tahun 1968, PMP tahun 1975, PPKN, PKN, akan tetapi perubahan yang dilakukan belum terbukti bisa merubah efektifitas Pendidikan Pancasila.
3. Oleh karena itu, diperlukan transformasi Pendidikan Pancasila di semua jenis, jenjang, dan jalur Pendidikan dalam kaitan dengan:
 - a. Konten pembelajarannya yg bersumber dari ideologi Pancasila berdasarkan sumber-sumber primer
 - b. Pendekatan pembelajaran yang terpusat kepada guru harus ditransformasi menjadi pembelajaran berbasis project yang mengaktifkan para siswa untuk belajar.
 - c. Pendekatan pembelajaran tidak berorientasi terhadap penguasaan teori, tetapi berorientasi terhadap proses belajar, agar tumbuh nurturing effect dalam penanaman nilai Pancasila.
 - d. Assemsment pendidikan Pancasila harus ditransformasi dari ujian teori menjadi uji perilaku yang menentukan terhadap kelulusan sekolah atau kenaikan kelas.

7. Yang merumuskan materi Pancasila adalah Puskur, BPIP memberikan guideline .
8. Perlu merevisi UU No 20/2003 tentang Sisdiknas yang menjadi dasar untuk memasukkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang dan jenis Pendidikan.
9. Konten dan metodologi Pancasila yang jadi perhatian. Pendekatannya adalah bukan hafalan, teori, dan ceramah, tetapi menggunakan project dalam bentuk tema-tema kajian yang relevan.
10. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan survey karakter, seperti penilaian teman sebaya, penilaian diri, penilaian pendidik, juga melalui portofolio
11. Pancasila adalah nilai harus dibedakan dengan mata pelajaran lain, karena itu metodologi harus terwujud dalam contoh/praktik kegiatan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah yang mencerminkan nilai Pancasila.
12. Guru sebagai teladan Pancasila. Pancasila dalam Perbuatan sebagai contoh literatur kontekstualisasi Pancasila dalam sikap hidup dg dunia nyata.

KONSEPSI IMPLEMENTASI: MELAKUKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN

Membangun sistem pembelajaran yang bermutu, yang didukung tiga komponen sbb:

1.
STANDARD
KOMPETEN-
SI SISWA

2.
KURIKULUM
SEKOLAH
YANG
TERDIVER-
SIFIKASI

3.
ASESMEN
KOMPETENSI
SISWA

STANDARD KOMPETENSI SISWA

Secara generik, standar kompetensi siswa yang perlu disusun dan dikembangkan secara berurutan terdiri atas:

1. **Standar minimum literasi dan numerasi dasar dalam** ekosistem luar jaringan digital (luring) dan ekosisten dalam jaringan digital (daring) yang dapat dicapai melalui pembelajaran dan pelatihan di sekolah berupa aplikasi literasi matematik, literasi sains, literasi membaca dan menulis dalam kehidupan sehari-hari.
2. **Standar kecakapan hidup terpakai (*applied life skills*)** baik wajib maupun pilihan, yang dibutuhkan siswa dalam lingkungan pekerjaan dan usaha yang dapat diperoleh melalui kursus dan pelatihan keterampilan pilihan, praktik laborarorium, magang dan lain-lain baik yang dilakukan secara luring maupun daring.
3. **Standar kemampuan berfikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*)**, yang dapat dicapai melalui proses pembelajaran dengan pendekatan tematik berbasis mata pelajaran seperti *project-based*, *problem-based*, dan *experiential learning* untuk pengembangan kemampuan berfikir kritis dan kreatif.
4. Standar kompetensi tertinggi yang dapat dicapai melalui proses **internalisasi nilai-nilai karakter Pancasila**, baik melalui pembelajaran di kelas, budaya sekolah, program ekstrakurikuler.

KURIKULUM TERDIVERSIFIKASI

Di era perubahan cepat ini, kurikulum sekolah harus terdiversifikasi, memuat program-program pendidikan (program studi) yang menurut pemikiran awal setidaknya mencakup empat program:

1. Program pendidikan literasi karakter bangsa sebagai perekat NKRI melalui kajian-kajian terkait dengan **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Pendidikan bahasa Indonesia, dan Pendidikan Global.**
2. Program pendidikan aplikasi literasi dasar bidang matematik, sains, serta **literasi membaca, menulis, menyimak dan menutur, serta literasi digital.**
3. Program pendidikan literasi **kecakapan hidup terapan** berorientasi wilayah dan lingkungan berdasarkan minat, bakat dan kemampuan siswa, termasuk bahasa daerah.
4. Program kajian akademik berbasis ilmu pengetahuan melalui berbagai kajian isu lingkungan dalam perspektif **literasi akademik** (IPA, IPS, Bahasa Inggris, Olah Raga dan Seni).

ASESMEN KOMPETENSI SISWA

Berdasarkan jenis standar kompetensi sebagaimana dijelaskan di atas, tiga jenis asesmen pendidikan yang dirancang sebagai sistem yang menentukan kelulusan sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Asesmen literasi dan numerasi bidang matematik, sains, serta membaca dan menulis berdasarkan standar yang diadopsi dari PISA; asesmen literasi ini dikelola oleh otoritas sistem pembelajaran tingkat pusat yang dilakukan setiap tahun terhadap siswa kelas 5, 8 dan 11; capaian standar harus dipetakan oleh otoritas tersebut pada setiap standar kompetensi, setiap program studi, setiap sekolah, dan wilayah agar dapat diakses oleh *stakeholder* sebagai bahan perbaikan.
2. Asesmen literasi lintas disiplin yang mencakup bidang: kajian sosial dan humaniora (yang meliputi PPKn dan karakter, ekonomi dan bisnis, geografi, dan sejarah); pendidikan literasi bahasa Indonesia dan bahasa daerah; dan pendidikan literasi teknologi. Asesmen kelompok literasi ini dikelola oleh guru dan sekolah (termasuk survey karakter) yang dilakukan setiap tahun untuk siswa kelas 6, 9 dan 12. Capaian standar harus dipetakan oleh sekolah berdasarkan pedoman dari “otoritas” pada setiap standar kompetensi dan kajian yang dapat diakses oleh *stakeholder* sebagai bahan perbaikan.
3. Asesmen kecakapan hidup (seperti literasi dasar (dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah), literasi bisnis, literasi seni-budaya, literasi olahraga, literasi digital, dsb.) dapat dilakukan dengan sertifikasi sekolah jika pelatihan diselenggarakan di sekolah, atau sertifikasi kecakapan oleh provider yang relevan jika pelatihan dilakukan di lembaga kursus di luar sekolah. Uji kompetensi bekerja dapat dilakukan melalui serifikasi oleh industri dan perusahaan yang relevan bagi para siswa yang melaksanakan magang.

Pancasila, Mapel Sendiri atau Integrasi dengan PKN?

Rasional Integrasi dengan PKN menjadi PPKN.

1. Menambah beban mata pelajaran
2. Harus menambah guru dan jurusan di LPTK dan proses sertifikasi
3. PPKN pernah ada dalam kurikulum KBK Th 2004 (direview dan diperkaya)
4. Pancasila sulit menjadi maple sendiri karena materinya tumpang tindih dengan PPKN
5. Pancasila adalah nilai (ideologi) yang dalam prakteknya memerlukan banyak contoh-contoh aplikatif. Guru sebagai sumber contoh dari nilai-nilai Pancasila dalam perbuatan
6. Pada tahun 1975, PMP telah menjadi mata pelajaran sendiri, tetapi tidak berhasil karena kontennya adalah nilai-nilai Pancasila yang dihafal.